



EXECUTIVE SUMMARY

INFORMASI KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2016



18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang | **2018**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017



EXECUTIVE SUMMARY INFORMASI KINERJA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016

Provinsi Sumatera Selatan yang ibu kotanya Palembang merupakan bagian dari Pulau Sumatera yang mempunyai luas wilayah 91,592.43 Km², yang terletak pada 1°-4° Lintang Selatan dan 102°-106° Bujur Timur. Berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan secara administratif dibagi menjadi 13 (belas) kabupaten dan 4 (empat) kota yang meliputi Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang dan Kota Prabumulih.

Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi, seperti kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas perairan, kerusakan lingkungan di berbagai sektor dan meningkatnya timbulan sampah.

1. Permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan

State/Status

Banyak kerugian negara telah ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan, selain berdampak pada penurunan kualitas lingkungan berupa pengurangan tutupan lahan dan kawasan resapan air, juga berakibat pada banjir dan secara global berdampak pada perubahan cuaca dan iklim. Selain itu kebakaran hutan juga secara langsung telah mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terpapar asap, begitu juga aktivitas ekonomi dan transportasi turut terganggu. Secara politik kebakaran hutan juga telah mempengaruhi pergaulan Indonesia di dunia International. Kebakaran hutan telah menjadi isu nasional yang terjadi setiap tahun.





Puncak kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah hotspot sebanyak 27.043 titik dengan luas kebakaran tahun 2015 seluas 736.563 Ha, sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan saat ini jarang terjadi dan walaupun ada kebakaran tergolong dalam skala kecil berkisar 0,25 dan paling luas 2 Ha per kejadian, umumnya berada pada lahan mineral. Luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2016 keseluruhan seluas 978,36 Ha, terdiri dari kebakaran pada kawasan hutan 157,59 Ha dan di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain) seluas 820,77 Ha.

Jumlah hotspot pada Tahun 2016 Periode Januari sampai dengan Desember 2016 sebanyak 959 titik, sangat berkurang dibandingkan pada periode yang sama 2015 sebanyak 27.043 titik.

Pressure

Kemajuan pembangunan di suatu wilayah sejalan dengan peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk yang diiringi meningkatnya kualitas dan kuantitas kebutuhan hidup (Widjaya, 1998). Dampak dari peningkatan kualitas dan kuantitas hidup tersebut yaitu terjadinya perubahan tata guna lahan yang sulit dikendalikan dan sering terabaikannya aspek lingkungan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Hal inilah yang menjadi tekanan terhadap tata guna lahan.

Para ahli menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kekeringan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a. kekeringan meteorologis berkaitan dengan curah hujan di bawah normal dalam satu musin, b. kekeringan hidrologis berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah, c. kekeringan pertanian berhubungan dengan kekurangan kandungan air di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas. Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kekeringan menyebabkan penderitaan yang hebat bagi penduduk pada suatu





daerah yang mengalaminya. Oleh sebab itu, kekeringan adalah salah satu bencana yang dapat mematikan bagi manusia. Dimana kekeringan yang panjang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Response/Upaya

Berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan atau program dan kegiatan lainnya. Adapun berbagai upaya tersebut yaitu:

1. Pemantauan hotspot dan pemantauan perkembangan iklim dan cuaca secara terus menerus sepanjang tahun sebagai dasar dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat lapangan.
2. Pendataan dan pemetaan daerah rawan kebakaran dan desa rawan kebakaran telah dilakukan guna mengidentifikasi daerah prioritas pencegahan kebakaran.
3. Sosialisasi pencegahan kebakaran secara terpadu ke desa-desa rawan kebakaran oleh pemerintah, TNI, POLRI, perusahaan perkebunan dan HTI dilakukan secara terus menerus sejak bulan Januari 2016.
4. Sejak awal Januari juga melakukan rapat koordinasi lintas sektor tingkat provinsi dan dilanjutkan rapat koordinasi di masing-masing kabupaten.
5. Pemegang ijin HTI melakukan *canal blocking* secara bertahap pada periode Januari sampai dengan saat ini telah dibuat sebanyak 695 unit dan pembuatan embung 341 unit.
6. Rapat koordinasi Kapolda, SKPD terkait dengan perusahaan perkebunan se Sumatera Selatan tentang pengendalian kebakaran pada perusahaan perkebunan pada tanggal 31 Maret 2016.
7. Audit kepatuhan pada 44 pemegang ijin HTI dan perkebunan mulai 15 Pebruari sd 24 Maret 2016 dengan hasil 52,27% baik, 25 % kurang dan





- 9,1% sangat kurang. Dan kepada kategori kurang serta sangat kurang telah dilakukan pembinaan serta telah menunjukkan adanya perbaikan-perbaikan.
8. Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan:
 9. Penyebarluasan Maklumat Kapolda tentang larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan.
 10. Pembentukan Pokmas Desa Peduli Api pada 102 desa (DPA/MPA/ KTPA) tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir dan OKI.
 11. Pembentukan Posko Terpadu Karhutlah Tingkat Provinsi di BPBD, dan 5 (lima) Kabupaten rawan kebakaran (OKI, MUBA, Ogan Ilir, Banyuasin dan Muara Enim), Posko Kecamatan dan Desa serta kabupaten lainnya.
 12. Posko dan Patroli Terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tingkat lapangan melibatkan Tim Manggala Agni, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, TNI, Polri, Pol PP, perusahaan HTI, perusahaan perkebunan dan unsur masyarakat dimulai sejak Maret.
 13. Selain Posko dan Patroli Terpadu juga dilakukan secara mandiri oleh SKPD terkait, kecamatan, desa, Polsek, Koramil, Babinsa, Babinkamtibmas di seluruh wilayah Sumatera Selatan dan hasilnya secara berjenjang dilaporkan kepada pimpinan masing-masing sebagai bahan melakukan tindakan bersama.
 14. Patroli Udara dan Pemadaman Bantuan BNPB.
 15. Untuk mendeteksi kejadian kebakaran secara *real time*, pada tanggal 30 Agustus 2016 dilakukan uji coba pemantauan kebakaran menggunakan pesawat tanpa awak (UAV) kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang difasilitasi GIZ Bioclimate.



2. Permasalahan Penurunan Kualitas Perairan

State/Status

Sebagai akibat dampak dari menurunnya jumlah kawasan yang berfungsi sebagai Daerah Tangkapan Air (*Catchmen Area*) yang disertai dengan penurunan kualitasnya, telah memicu berkurang atau hilangnya kawasan yang kaya dengan vegetasi (Hutan DAS) yang berpengaruh langsung terhadap hidrologi.

Sesuai status mutu air yang diperoleh pada tahun 2016 dibandingkan dengan hasil Tahun 2015, terdapat perbaikan kualitas air namun masih tetap dalam tahap yang memprihatinkan jika tidak dilakukan secara serius. Hal ini dapat dilihat dari 58 titik lokasi pantau di Tahun 2015 yang berstatus tercemar berat menjadi 41 titik lokasi pantau di Tahun 2016 dari 72 lokasi di kabupaten/kota. Hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar bersumber dari aktifitas/kegiatan masyarakat seperti pertanian/perkebunan dan pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian kontribusi terbesar dalam pemantauan kualitas air adalah parameter *BOD, COD, Phenol, Klor Bebas, dan Sulfida*.

Pressure

Meningkatnya Jumlah Jenis Industri/Kegiatan Usaha merupakan salah satu penyebab dari penurunan kualitas lingkungan perairan. Belakangan ini kita sering mendengar sungai-sungai penting terutama sungai-sungai yang berada di wilayah perkotaan mengalami pendangkalan dan bahkan kering. Revolusi industri dan membaiknya tingkat kesehatan menyebabkan populasi manusia berkembang dengan sangat cepat dan ini mengakibatkan tekanan yang lebih besar terhadap lingkungan, termasuk lingkungan sungai dan daerah tangkapannya.

Sejalan dengan itu, peran sungai bertambah satu lagi, yaitu menjadi penampung limbah industri maupun domestik. Masalahnya setiap sungai memiliki batas maksimum daya tampung lingkungan. Apabila daya tampung tersebut terlampaui, maka sungai akan kehilangan fungsi sebagaimana mestinya. Padahal kita tahu berbagai bencana lingkungan selalu erat kaitannya dengan menurunnya fungsi sungai dan daerah tangkapannya.





Proses kegiatan industri merupakan penggerak ekonomi di suatu daerah bahkan masyarakat disekitar industri mendapatkan nilai tambah dan keuntungan dari industri. Disisi lain penurunan kualitas lingkungan akan terjadi karena keberadaan industri. Industri bisa menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan industri yang ada.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi dapat dihindari jika limbah yang dihasilkan dikelola dengan baik dan menerapkan sistem yang ramah lingkungan dalam proses produksi dan kegiatan di lingkungan pabrik.

Limbah yang dihasilkan umumnya berupa bahan sintetik, logam berat, bahan beracun berbahaya yang sulit untuk diurai oleh proses biologi (*nondegradable*) selain itu limbah industri bersifat menetap dan mudah terakumulasi (biomagnifikasi) bahkan logam berat sebagai sebuah unsur memiliki sifat menetap di alam tidak dapat dihilangkan. Limbah yang dihasilkan industri berwujud padat, cair dan gas akan menyebabkan pencemaran air, udara, tanah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) jika tidak dikelola dengan baik. Dengan semakin meningkatnya industri-industri di Sumatera Selatan, sumber tekanan terhadap lingkungan paling utama yang berasal dari sektor industri adalah :

- a. Masih terdapatnya industri kecil yang belum mengelola limbah cair dan emisi gas buang.
- b. Pencemaran limbah cair, udara dan pada beberapa industri skala besar dan menengah.
- c. Masih kurangnya pihak ketiga yang berizin yang mengelola limbah Bahan Berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh industri di Sumatera Selatan.

Peningkatan jumlah kepemilikan terhadap fasilitas sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 disebabkan oleh perilaku masyarakat yang belum berbudaya lingkungan. Sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan. Peningkatan fasilitas sanitasi yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat diikuti oleh peningkatan terhadap jumlah masyarakat yang tidak memiliki fasilitas sanitasi. Biasanya kebiasaan membuang limbah tinja ke sungai





atau kolam pada daerah pedesaan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Manusia pada hakekatnya tidak akan bertahan hidup tanpa kehadiran air, sebagai makhluk yang berakal, manusia mempunyai kemampuan untuk memilih tempat tinggal dan beraktivitas yang tidak jauh dari sumber air, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membentuk koloni di berbagai kawasan yang letaknya tidak jauh dari sungai. Fenomena perilaku manusia dalam memilih tempat tinggal dan beraktivitas dapat dilihat dari berbagai pengalaman sejarah masa lalu baik pada zaman prasejarah maupun pada era kerajaan serta lingkungan modern pada saat ini. Itu pulalah lingkungan sungai menjadi pusat aktivitas.

Response/ Upaya Pengelolaan

Menyikapi hasil pemantauan kualitas air sungai DAS Musi pada 72 titik di 16 Kabupaten/Kota pada Tahun 2016 ternyata salah satu parameter kunci **BOD, COD, Phenol, Klor Bebas, dan Sulfida** menjadi parameter dominan tercemar sehingga melampaui baku mutu dan secara otomatis status air menjadi tercemar. Maka dengan ini koordinasi kepada instansi terkait di daerah (Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Dinas PU Cipta Karya), dengan memprioritaskan kegiatan rehabilitasi hutan, penggunaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, pembuatan saluran-saluran irigasi untuk menghindari *run-off* pada waktu musim penghujan, melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tidak melakukan *illegal logging* dan penambangan *illegal* yang marak di daerah hulu sungai.

Dari hasil evaluasi kerusakan lingkungan khususnya di perairan maka kegiatan pokok yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam meResponse kondisi tersebut antara lain :

1. Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri (Proper)
2. Penerapan AMDAL bagi usaha dan kegiatan industri
3. Penyusunan regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar Kualitas) lingkungan hidup dan





- penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum. Peraturan Daerah (Perda) No. 17 Tahun 2016 ditetapkan tanggal 29 Desember 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4. Penanganan Pengaduan Lingkungan pada tahun 2016 sebanyak 16 perusahaan
 5. Pengujian parameter kualitas lingkungan di Laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan.
 6. Pengembangan dan penerapan berbagai instrument pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan dan perijinan. Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 ditetapkan tanggal 24 Oktober 2016.

3. Meningkatnya kerusakan lingkungan dari berbagai sektor kegiatan

a. Sektor Pertambangan

Batubara adalah sumber energy terbesar yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan cadangan sebesar 24,24 miliar ton atau 48,85 persen dari cadangan nasional yang sebesar 57,84 miliar ton, secara umum batubara di Sumatera Selatan berjenis lignit dengan kandungan kalori antara 4800-5400 kcal/kg.

Potensi CBM Sumatera Selatan tercatat sebesar 183 TCF atau 39 persen dari total potensi CBM Nasional, sedangkan potensi panas bumi sebesar 1.911 Mwe yang tersebar di Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Muara Enim.

Dengan kondisi jumlah sumber daya alam melimpah terutama potensi sumber daya energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan *Coal Bed Methan* (CBM) serta energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro dapat menimbulkan permasalahan tersendiri jika tidak dilakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup.





b. Sektor Perikanan dan Kelautan

Terjadinya degradasi Lingkungan Pesisir, Laut, Perairan Umum Daratan dan Pulau-pulau Kecil dan sumber daya Kelautan dan Perikanan dengan isu strategis yang terjadi yaitu :

- Penebangan pohon mangrove untuk bahan kayu bakar dan bangunan
- Pengulitan pohon mangrove untuk bahan pengawet
- Konversi lahan ekosistem mangrove untuk tambak udang
- Illegal Fishing/Penangkapan Ikan dengan alat tangkap yang di larang seperti, trawl, mini trawl, setrum, bom dan lain-lain

Data penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan mangrove sebesar 1.119,77 Ha mangrove selama tahun 2000 hingga 2014. Mangrove yang pada tahun 2000 sebanyak 2.296,34 Ha berubah menjadi 1.629,63 Ha pada tahun 2004 dan di tahun 2014 menunjukkan mangrove bersisa 1.176,57 Ha. Data menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pengurangan lahan mangrove secara signifikan adalah adanya aktifitas dari manusia.

Pembukaan mangrove secara besar-besaran di pantai timur sumatera selatan dilatar belakangi oleh bangkrutnya perusahaan tambak terbesar di Asia Tenggara pada tahun 1999-2000 yaitu PT.Dipasena Citra Darmaja di Lampung yang berbatasan dengan Sumatera Selatan. Pembudidaya udang yang dulunya karyawan PT.Dipasena Citra Darmaja sudah memiliki keahlian dalam budidaya udang atau bandeng mulai mencari lahan area tambak baru yang masih subur, sehingga mereka mulai masuk ke pesisir timur Sumatera Selatan mulai dari desa sungai menang, sungai pasir, sungai lumpur, simpang tiga makmur. Pada awalnya satu dua orang mencoba membuka tambak baru, namun ketika melihat keberhasilan temannya maka yang lain termasuk penduduk asli di desa tersebut ikut membuka lahan tambak baru, sehingga dalam kurun waktu tiga tahun sudah terjadi perubahan mangrove menjadi tambak baru seluas 15.759,36 Ha.



Praktek Perikanan Ilegal Di Sumatera Selatan

Sumatera Selatan memiliki Potensi laut dengan panjang pantai \pm 500 km panjang pantai membentang dari sungai Mesuji (berbatasan dengan Provinsi Lampung) dan Sungai Benu (berbatasan dengan Provinsi Jambi) dengan potensi produksi sebesar 152.280 ton dan luas perairan sebesar 47.000 km² dengan potensi produksinya sebesar 4.352 ton/tahun, potensi perairan umum dengan luas sebesar 2.505.000 Ha dengan potensi produksi sebesar 50 kg/Ha/tahun. Data penelitian menunjukkan terdapat 230 jenis ikan hidup di perairan Sumatera Selatan, hal ini membuktikan keanekaragaman jenis ikan di perairan Sumatera Selatan merupakan potensi yang sangat besar jika dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan.

Potensi sedemikian besar itu membuat masyarakat perikanan Sumatera Selatan dapat memanfaatkan sumberdaya ikan secara berlebihan, sehingga pemanfaatan sumberdaya ikan sampai overfishing. Hal ini terbukti dengan semakin menurunnya produktivitas perikanan di seluruh wilayah Sumatera Selatan baik perairan laut maupun perairan umum.

Salah satu faktor utama yang menjadikan penurunan produksi ikan secara kualitas dan kuantitas yaitu praktek ilegal fishing. Praktek Illegal fishing sangat merugikan bagi perikanan Sumatera Selatan mulai dari pemerintah, stake holder, masyarakat perikanan, ketersediaan sumberdaya ikan terutama nelayan baik nelayan laut ataupun nelayan perairan umum.

Salah satu contoh kerugian akibat illegal fishing adalah hampir punahnya sumberdaya ikan belida yang dulu merupakan maskot produk perikanan di Sumatera Selatan.

Praktek Illegal fishing di Sumatera Selatan yang paling dominan sampai saat ini adalah penyetruman, racun ikan dan kekurangan dokumen administrasi.

Peristiwa pelanggaran kasus yang terjadi di Sumatera Selatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Alat tangkap (penyetruman, trawl)





2. Wilayah izin

Namun demikian kasus yang paling banyak terjadi adalah penyetruman, sampai tahun 2015 dari data yang diperoleh pelanggaran dengan alat tangkap setrum masih tinggi.

Response/Upaya Pengelolaan

a. Sektor Pertambangan

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menanggulangi terjadinya peningkatan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan salah satunya melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP. Kegiatan tersebut dilakukan oleh inspektur tambang seperti :

- 1) Kegiatan evaluasi terhadap laporan pemantauan lingkungan dan pengelolaan lingkungan (RKTTL).
- 2) Kegiatan pembahasan dokumen teknik dan lingkungan.
- 3) Melakukan inspeksi ke lokasi tambang sesuai peraturan :
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
 - Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



- Keputusan Menteri 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum

b. Sektor Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan upaya-upaya penataan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil supaya tidak melebihi ambang batas daya dukung dan daya tampung, seandainya sudah ada pemanfaatan potensi kekayaan alam yang berlebihan seperti pemanfaatan mangrove untuk tambak udang yang melebihi batas, maka harus dilakukan penataan sesuai peruntukannya.

4. Meningkatnya timbulan sampah di perkotaan

State/Status

Permasalahan lingkungan yang paling utama diperkotaan adalah masalah pengelolaan sampah. Dimana dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah timbulan sampah di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2015, jumlah timbulan sampah tahun 2015 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 187.000 m³/hari, sedangkan pada tahun 2016 bertambah menjadi 300.062 m³/hari. Apabila dibandingkan antara kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan, maka Kota Palembang merupakan kota yang menghasilkan timbulan sampah terbesar yaitu 56.340 m³/hari.

Pengelolaan sampah di kabupaten/kota belum sepenuhnya menggunakan system *sanitary landfill*, sebagian masih menggunakan system *open dumping* sehingga berpotensi timbul bau, lalat dan pencemaran air tanah, serta perlu pengadaan TPA baru karena TPA yang lama cepat penuh.

Jumlah timbulan sampah akan bervariasi nilainya pada satu waktu dan waktu lainnya, satu daerah dan daerah lainnya.. Hal ini dikarenakan jumlah timbulan sampah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya ada atau tidaknya proses





reduksi di sumber, factor *recycle*, faktor geografi dan faktor fisik (lokasi, frekuensi pengumpulan sampah dan musim), jumlah penduduk dan tingkat hidup, pola hidup, mobilitas masyarakat, pola penyediaan kebutuhan, serta cara penanganan makanan. Klasifikasi timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota yaitu bervariasi dari 2–3,5 l/orang/hari.

Pressure

Meningkatnya timbulan sampah di Provinsi Sumatera Selatan akan menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi kesehatan penduduknya, begitu juga halnya terhadap kondisi lingkungan dan kondisi sosial ekonomi. Pada tahun 2016, sebagaimana tercatat pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, terdapat beberapa penyakit yang disebabkan oleh timbulan sampah, seperti penyakit diare mencapai 170.964 jiwa, demam berdarah sebanyak 3.854 jiwa, malaria + sebanyak 2.179 jiwa dan penyakit kusta 380 jiwa. Disamping itu, semakin meningkatnya timbulan sampah dan kurang memadainya manajemen pengelolaan sampah tersebut, seperti terdapatnya pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan resiko bencana banjir dan akan memberikan dampak negatif terhadap fasilitas umum seperti jalan, jembatan, drainase dan sebagainya

Response/Upaya Pengelolaan

Dalam menanggulangi peningkatan timbulan sampah di perkotaan, sangat diperlukan berbagai upaya yang serius agar timbulan sampah menjadi berkurang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menangani masalah persampahan tersebut, diantaranya:

- a. Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Sampah Daerah di Sumatera Selatan.
- b. Pada Tahun 2016 sudah dilaksanakan MOU (Nota Kesepakatan) untuk pembangunan TPA regional antara Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang.





Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat berbagai inovasi yang telah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

1. Inovasi Produk Bioteknologi Cegah Kebakaran Hutan dan BBM ramah Lingkungan

a. Inovasi Teknologi Nusantara Gapo 44

Nusantara Gapo 44 (busa Anti Api) merupakan terapan teknologi penanganan kebakaran dengan menggunakan cairan yang aman dan ramah lingkungan. teknologi ini sangat cocok diterapkan pada jenis kebakaran bahan bakar berbasis minyak atau disebut kebakaran kelas B (minyak, solar dan cairan lainnya), juga untuk memadamkan kebakaran benda padat (kelas A).

b. Bios 44 – Bio Struktur (Dekomposer Gambut)

Bios 44 adalah gabungan mikroorganisme yang mampu memproduksi endospora yang tahan terhadap faktor lingkungan hidup seperti : panas, asam, garam di dalam tanah sehingga mikroorganisme dapat bertahan dalam lingkungan ekstrim pada jangka waktu lama. Bios 44 agen hayati yang dihasilkan dari gabungan mikroorganisme mutualisme antar mikroorganisme berfungsi mempercepat pembusukan materi organik lahan gambut sekaligus melembabkan serta menutup rongga gambut dengan hifa dan miselia mikroorganisme yang terkandung dalam larutan yang sudah di formulasi.

c. Rekayasa Bahan Bakar Gapo Oil 44

Gapo Oil 44 merupakan bahan bakar nabati 100% yang dibuat dengan bahan baku yang berasal dari berbagai jenis limbah sisa produksi pembuatan minyak goreng, mulai dari limbah di kolam pembuangan paling akhir sampai limbah buah sawit busuk yang tidak berharga dan tidak bisa diproduksi lagi untuk pembuatan minyak goreng bisa diolah untuk dijadikan bahan bakar. Selain bahan baku berbasis limbah nabati, GAPO Oil 44 juga bisa diproduksi langsung dari berbagai sumber bahan baku berupa buah, batang, ranting dan daun tanaman-tanaman segar tidak busuk dan bukan limbah yang





menghasilkan minyak; seperti buah jarak, buah bintaro, buah kelapa sawit dan lain-lain.

2. Transportasi Terpadu ramah lingkungan *Light Rail Transit* (LRT)

Pembangunan *Light Rail Transit* menjadi pilihan karena :

- a. Transportasi umum terpadu yang ramah lingkungan
- b. Transportasi umum yang dapat mengurangi kemacetan
- c. Meningkatkan mutu dan kenyamanan pelayanan transportasi umum
- d. Menjadi icon baru kota Palembang sehingga dapat menarik investor asing dan minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Palembang.

Jalur Light Rail Transit ini akan membentang sepanjang 24,5 km dari Bandara SMB II sampai Depo di OPI Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan 13 stasiun (feeders).

3. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Palembang-Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Realisasi rencana pembangunan TPA Regional Kota Palembang-Kabupaten Banyuasin sudah pada tahap pembebasan lahan dan land clearing seluas 16,4 hektar yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Banyuasin tahun 2012. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membuat DED TPA Regional pada tahun 2015. Direktorat PLP Ditjen Cipta Karya telah menyetujui bantuan fisik pembnaganan TPA Regional dan telah memberikan buku pedoman kelembagaan dan pembnaganan TPA Regional serta arahan teknis untuk penutupan TPA Sukawinatan.

4. Membangun jejaring kerja

Membangun jejaring kerja adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani permasalahan lingkungan yang ada salah satu nya adalah *Asia Pacific High Level Meeting Bonn Challenge Landscape Restoration*, 9-10 Mei 2017.

Bonn Challenge menyerukan kepada negara-negara dan semua aktor swasta, masyarakat, NGOs, dan lainnya untuk mencapai target tersebut sebagai alat untuk





memenuhi beberapa tujuan internasional seperti CBD Aichi target 15, REDD+ UNFCCC, UNCCD dan SDGs.

Untuk mendorong komitmen dari berbagai kalangan di regional, Event Bonn Challenge diadakan di region, antara lain : *Bonn Challenge for Latin America* (20 Agustus 2015 dan 26 sampai 27 Agustus 2016) dan *The Africa High Level Bonn Challenge Roundtable, Rwanda* (Juli 2016, dengan komitmen 11,5 juta ha).